

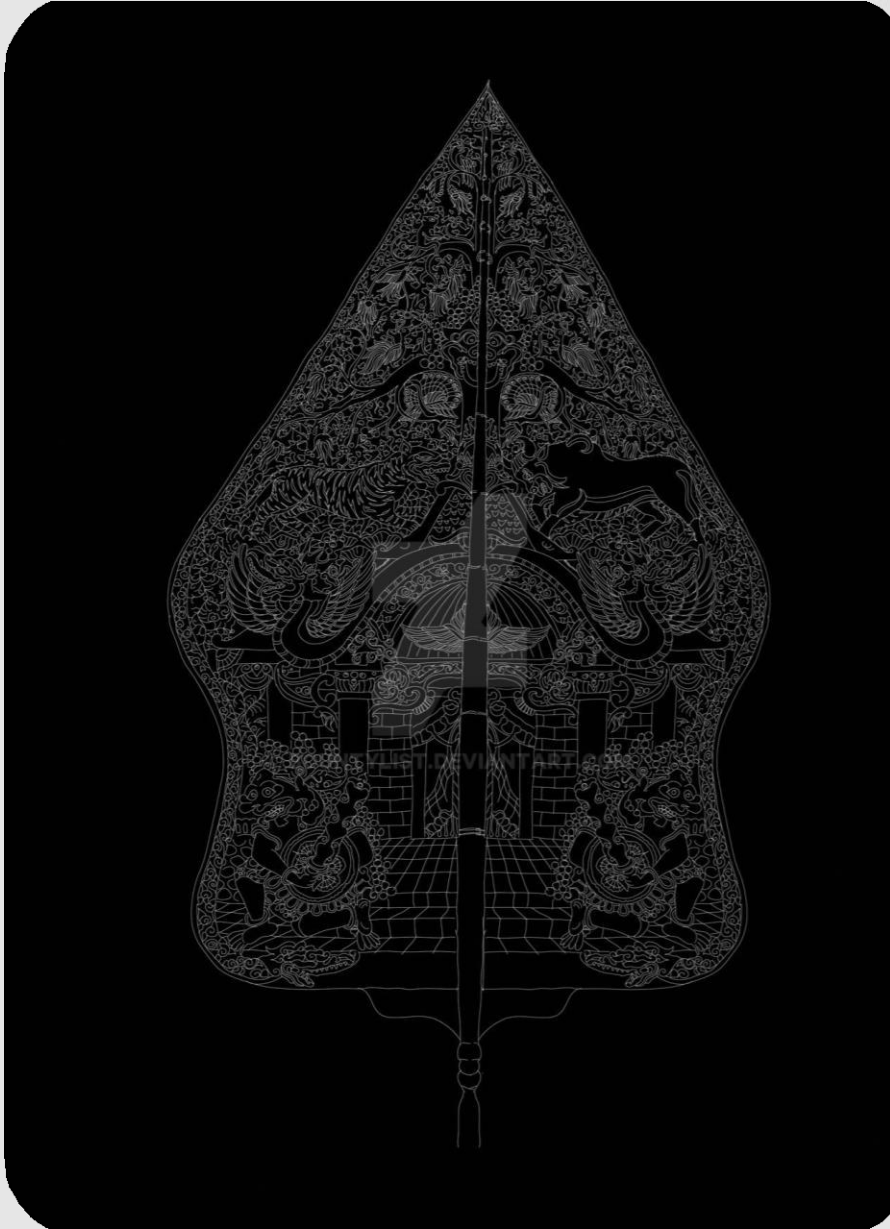


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
**BAPPEDA**

# **PENYELARASAN DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045**

Disampaikan dalam acara  
**MUSRENBANG RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Salatiga**

**Salatiga, 4 April 2024**



# *Outline*

- **Dasar Hukum dan Tahapan**
- **Kondisi Makro Jawa Tengah dan Kota Salatiga**
- **Arah Kebijakan Jawa Tengah 2025 - 2045**
- **Konsep Arah Pengembangan Wilayah**



# DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJPD 2025 – 2045 DAN RKPD 2025

## RPJPD 2025-2045

### 1. UU No. 25 Tahun 2004

#### **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Ps. 5 (1). RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional

### 2. UU No. 23 Tahun 2014 diubah dengan Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Pemerintahan Daerah

Ps. 263 (2). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah

### 3. Permendagri No. 86 Tahun 2017

#### **Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan**

Ps. 12 (1). RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah

### 4. Inmendagri No. 1 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

### 5. SEB Penyelerasan Rencana Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045

Nomor 600.1/176/SJ, Nomor 1 Tahun 2024

tentang Penyelerasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, tanggal 10 Januari 2024

# TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD 2025-2045 PROVINSI JAWA TENGAH



Pemerintah Provinsi  
Jawa Tengah

**RPJPD  
2025-2045**

**Konsultasi Ranwal  
Kemendagri**

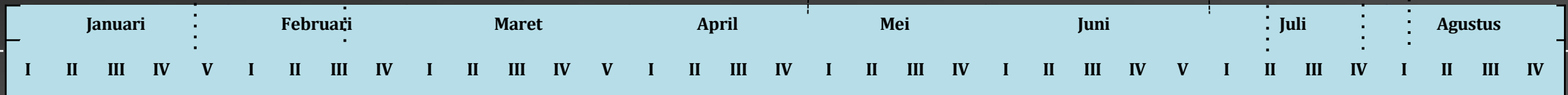
**Musrenbang**

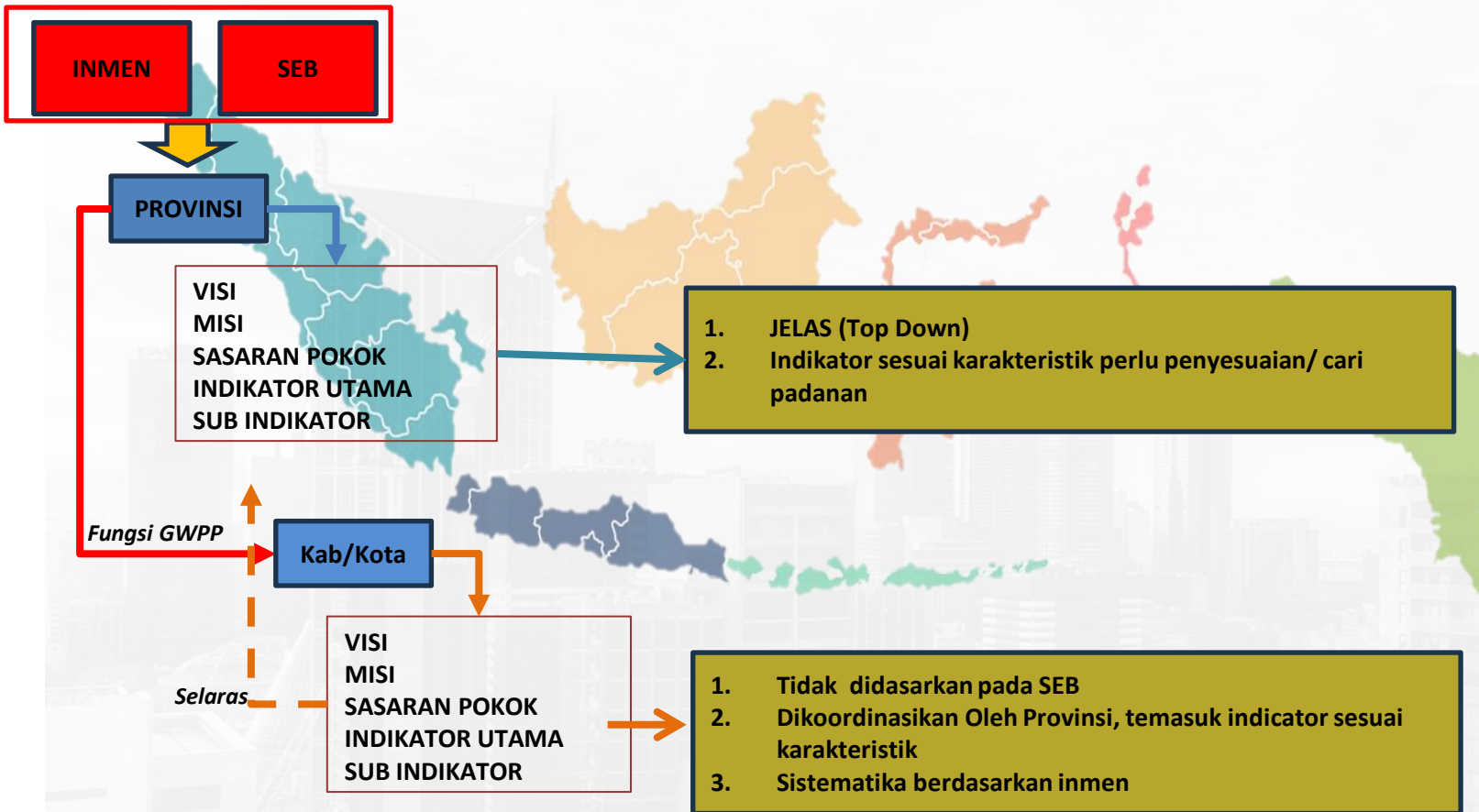
**Pembahasan  
Raperda dg DPRD**

**Evaluasi Raperda  
Kemendagri**

**Harmonisasi  
Rapeida  
Kemenkumham**

**Penetapan**





## Urgensi Penyelarasan RPJPN 2025-2045 dengan RPJPD 2025-2045

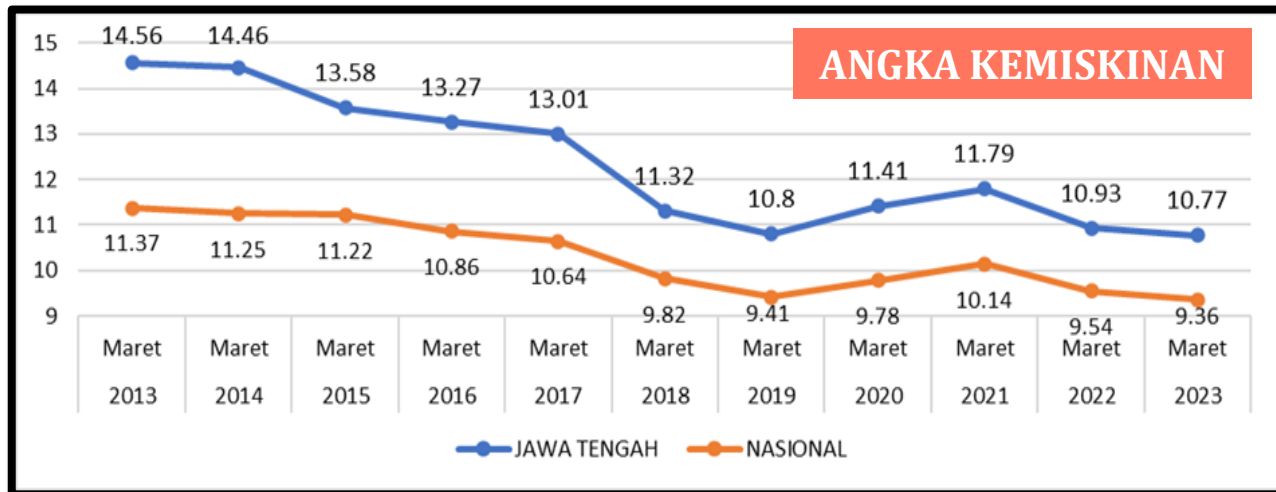
1. Periodisasi menjadi **seragam**;
2. Prioritas Nasional dan Arah Pembangunan:
  - Koheren;
  - Terokestrasi;
  - Menuju visi yg **searah dengan nasional**.
3. Rencana pembangunan menjadi **imperatif**.

**SEB akan memuat pedoman penyelarasan RPJPN dan RPJPD dalam penyusunan RPJPD Provinsi serta Inmendagri akan memuat pedoman (tata laksana) penyusunan RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota**

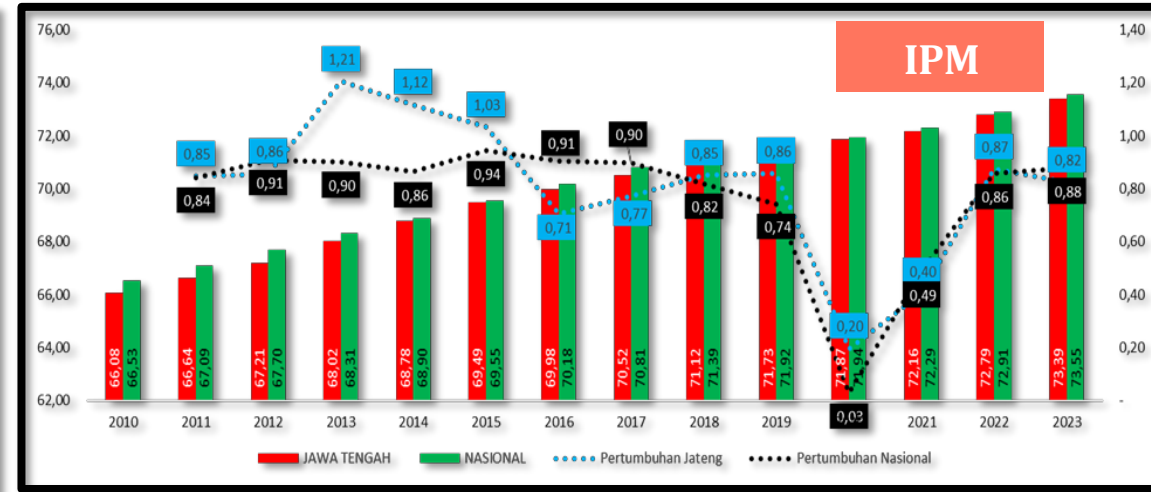


# KONDISI MAKRO JAWA TENGAH DAN KOTA SALATIGA

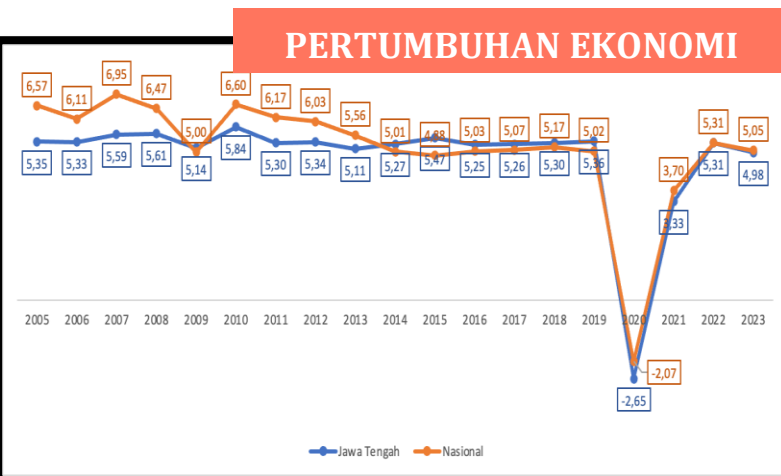




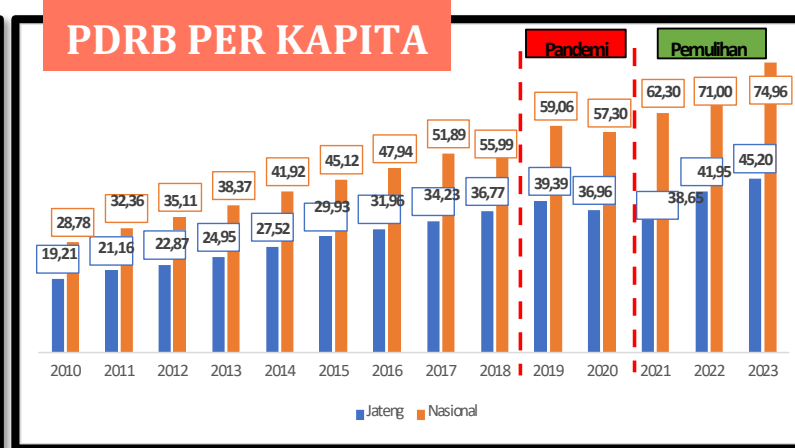
Dibandingkan Nasional, angka kemiskinan Jawa Tengah berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, **penurunan** angka kemiskinan Jawa Tengah pada periode 2013-2023 sejalan dengan angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan Jawa Tengah Maret 2023 di angka **10.77 persen**



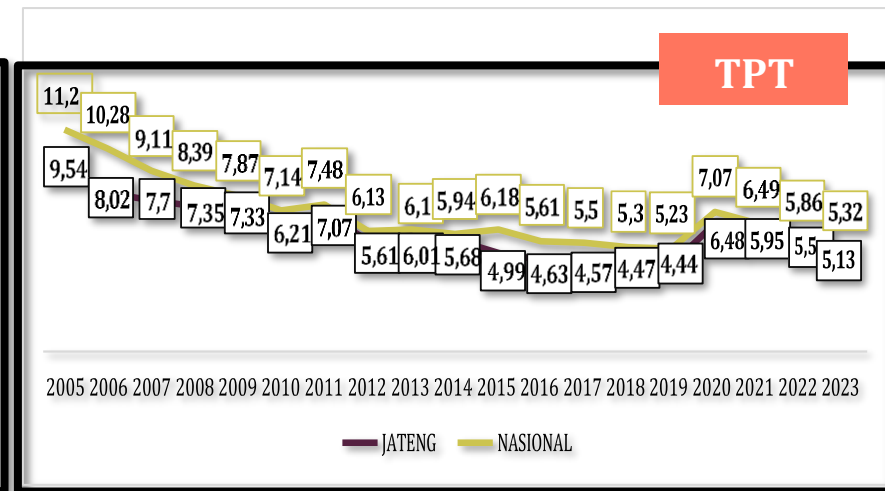
Capaian IPM Jawa Tengah sejak tahun 2010 terus mengalami **peningkatan** sejalan dengan Nasional. Capaian IPM Jawa Tengah pada tahun **2023** sebesar **73,39** dibawah angka Nasional yang sebesar 73,55, namun secara **rata-rata pertumbuhan lebih baik** dibandingkan nasional



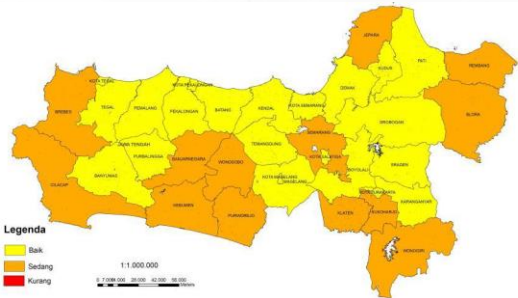
PE Jawa Tengah **tumbuh positif** pada kisaran angka 5 persen, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen akibat pandemi. Angka PE Jawa Tengah pada **4,98 persen**



Pertumbuhan ekonomi yang stabil diikuti dengan **kenaikan** nilai **PDRB per kapita**. Tahun 2023 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar **45,20 juta rupiah**, meningkat dari tahun 2022 yaitu sebesar 41,95 juta rupiah

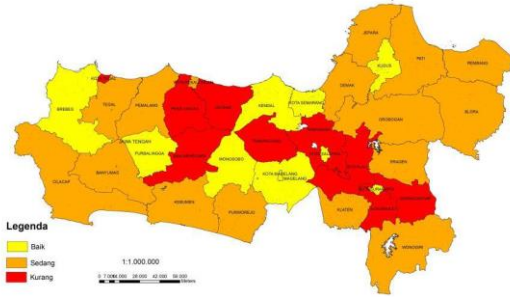


Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 7,70 persen berhasil diturunkan menjadi **5,13** pada tahun **2023**. Kondisi ini didukung dgn perkembangan wirausaha di Jawa Tengah yang semakin baik.



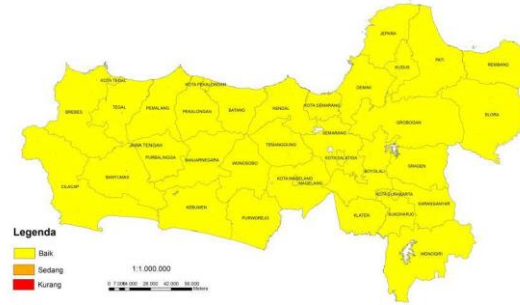
## Infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Mayoritas kab/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kondisi infrastruktur yang baik (22 Kab/Kota) dan sedang (13 Kab/Kota)



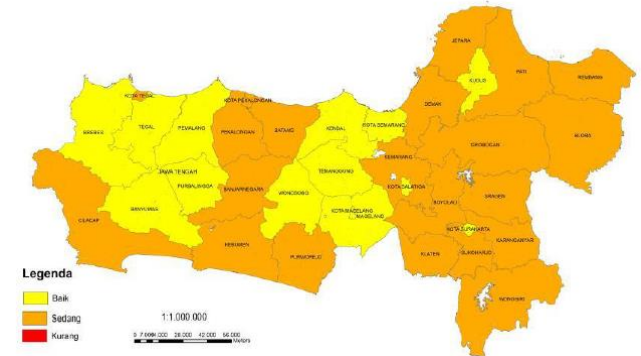
## Infrastruktur di Bidang Perhubungan

Mayoritas kab/kota di Provinsi Jawa Tengah berada dalam kondisi infrastruktur yang sedang (16 Kab/Kota), baik (10 Kab/Kota), kurang baik (9 Kab/Kota)



## Infrastruktur di Bidang ESDM

Keseluruhan kab/kota di Provinsi Jawa Tengah sudah berada di kondisi baik



## Infrastruktur Pendukung Pembangunan

Sebanyak 21 kab/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki infrastruktur pendukung pembangunan dalam kondisi sedang, serta 14 kab/kota berada pada kondisi yang baik

## Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Perekonomian Jawa Tengah :

Panjang jalan provinsi, rasio elektrifikasi dan akses air minum secara simultan berpengaruh terhadap PDRB provinsi Jawa Tengah sebesar 3,3 %. Nilai ini bisa semakin tinggi jika memperhitungkan infrastruktur selain terkait jalan, air minum, dan energi misalnya: bandara, pelabuhan, kawasan industri, bendungan, dan sektor pariwisata.

## JARINGAN JALAN TOL DI JAWA TENGAH



Total panjang tol yang telah beroperasi sepanjang 375,46 Km  
Pembangunan sebelum tahun 2012 sepanjang 36,6 Km  
Pembangunan kurun waktu 2013-2023 sepanjang 338,86 Km

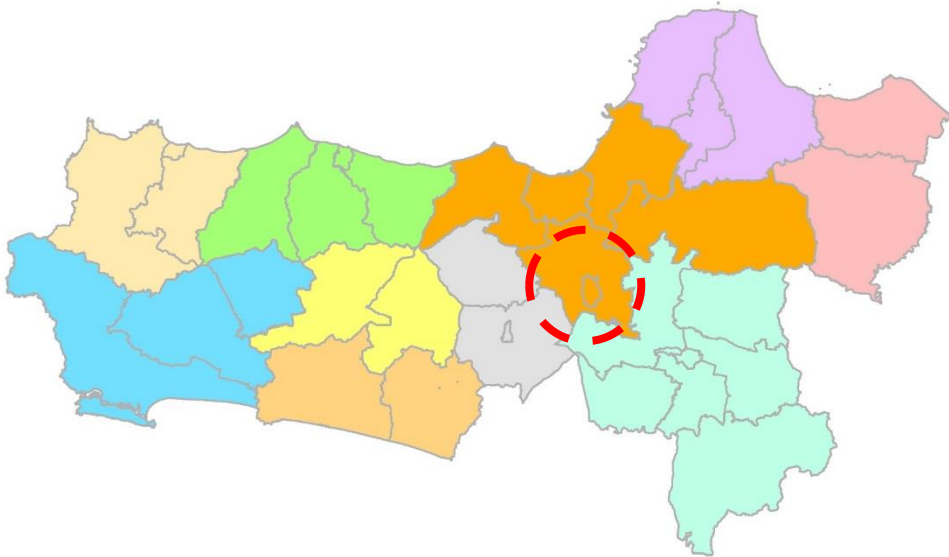
## BANGKITAN EKONOMI UMKM PADA REST AREA DI SEPANJANG JALAN TOL TRANS JAWA SUDAH BEROPERASI



Terdapat 19 Rest Area; 395 UMKM; dan 859 Pekerja

Pembangunan Jalan tol di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2013-2022 sepanjang **338,86 km**.  
Adanya jalan tol membangkitkan ekonomi UMKM pada rest area di sepanjang jalan tol trans Jawa.  
Hingga saat ini, terdapat 19 Rest Area, 395 UMKM, dan 859 pekerja.

# KONDISI MAKRO PEMBANGUNAN KOTA SALATIGA TAHUN 2023



No	Wilayah	Kemiskinan	IPM	Pertumbuhan Ekonomi	TPT
1.	Kab. Grobogan	11,72	71,49	4,98	4,02
2.	Kab. Demak	12,01	74,07	5,01	5,38
3.	Kab. Semarang	7,17	75,13	4,74	4,05
4.	Kab. Kendal	9,39	73,86	5,56	5,76
5.	Kota Semarang	4,23	84,43	5,79	5,99
<b>6.</b>	<b>Kota Salatiga</b>	<b>4,66</b>	<b>84,99</b>	<b>5,34</b>	<b>4,57</b>
7.	Rata-Rata WP	8,19	76,56	5,24	4,96
<b>8.</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>10,77</b>	<b>73,39</b>	<b>4,98</b>	<b>5,13</b>
<b>9.</b>	<b>Nasional</b>	<b>9,36</b>	<b>74,39</b>	<b>5,05</b>	<b>5,32</b>

Sumber: Ranwal RKPD Provinsi Jawa Tengah 2025

- **Pertumbuhan Ekonomi:** Kota Salatiga di atas Nasional dan Provinsi
- **TPT:** Kota Salatiga di bawah Provinsi maupun Nasional
- **IPM:** Kota Salatiga di atas Provinsi dan Nasional
- **Angka Kemiskinan:** Kota Salatiga di bawah angka Nasional maupun Provinsi



# ARAH KEBIJAKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2045



# Tema Pembangunan Wilayah RPJPN 2025-2045 sebagai panduan penajaman visi daerah

## 1 Tema Sumatera

Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia

## 2 Tema Jawa

Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan

## 3 Tema Kalimantan

Superhub Ekonomi Nusantara

## 4 Tema Bali-Nusra

Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusantara Bertaraf Internasional

## 5 Tema Sulawesi

Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

## 6 Tema Maluku

Hub Kemaritiman Wilayah Timur Indonesia

## 7 Tema Papua

Percepatan Pembangunan Wilayah Papua menuju Papua Sehat, Cerdas dan Produktif





Tema pembangunan Pulau Jawa:

## Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan



No	Provinsi	Tema
1	DKI Jakarta	Kota global hijau yang menjadi simpul ekonomi Asia Tenggara
2	Jawa Barat	Pusat <i>cutting-edge industry</i> , inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional
3	Jawa Tengah	Penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional
4	DI Yogyakarta	Mandala pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pusat pendidikan tinggi STEAM dan inovasi nasional
5	Jawa Timur	Mata-rantai penting ketahanan industri nasional dan pusat pengembangan agrikultur, agroindustri, dan ekonomi biru nasional
6	Banten	Penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional

# PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Belum optimalnya reformasi birokrasi

ASPEK GEOGRAFI

ASPEK KESRA

ASPEK DAYA SAING


ASPEK PELAYANAN UMUM

# ISU STRATEGIS DAERAH


01   
**Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan**

02   
**Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan**

03   
**Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan**

04   
**Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana**

05   
**Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia**

06   
**Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat**

07   
**Tata kelola pemerintahan yang dinamis**

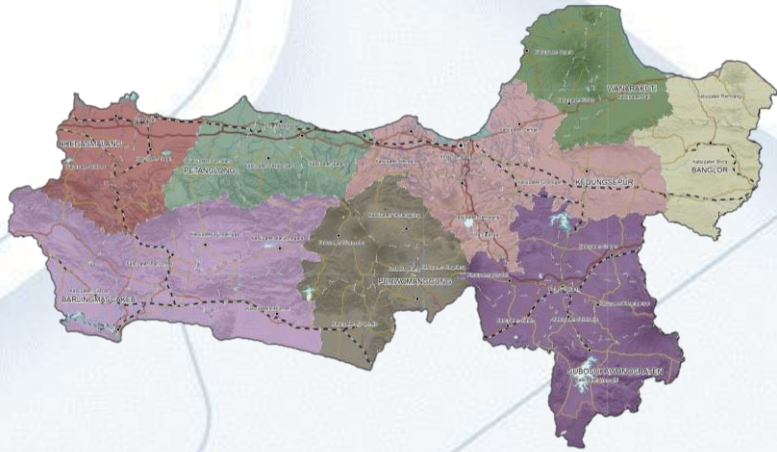


# LOGFRAME PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2025-2045





Tema Pembangunan Pulau Jawa dalam RPJPN :  
**Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif,  
Terintegrasi, dan Berkelanjutan**



Tema Pembangunan Jawa Tengah :  
**Penumpu ketahanan pangan dan  
rantai nilai industri nasional**

## VISI

**“JAWA TENGAH SEBAGAI PENUMPU PANGAN DAN  
INDUSTRI NASIONAL YANG MAJU, SEJAHTERA,  
BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN”**

## 5 Sasaran Utama Visi



**Peningkatan pendapatan per kapita:**  
PDRB Per Kapita, IBEI, Kontribusi PDRB sektor  
Industri, Kontribusi PDRB sektor Pertanian



**Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan:**  
Tingkat kemiskinan, Rasio Gini, Kontribusi  
PDRB Provinsi, Indeks Ketahanan Pangan



**Kepemimpinan dan pengaruh  
dunia internasional meningkat:**  
IDSD



**Peningkatan daya saing SDM:**  
Indeks Modal Manusia



**Penurunan Emisi GRK  
menuju net zero emission :**  
Penurunan intensitas emisi GRK

## 8 MISI

**01**

Transformasi Sosial

**03**

Transformasi Tata Kelola

**05**

Ketahanan Sosial,  
Budaya dan Ekologi

**07**

Sarana Prasarana Berkualitas  
dan Ramah Lingkungan

**02**

Transformasi Ekonomi

**04**

Keamanan Daerah Tangguh,  
Demokrasi Substansial, dan  
Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

**06**

Pembangunan Kewilayahan  
yang Merata dan Berkeadilan

**08**

Kesinambungan  
Pembangunan



# TAHAPAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD JAWA TENGAH 2025-2045

## PERWUJUDAN VISI

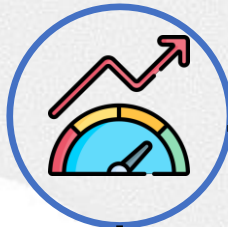
**JAWA TENGAH SEBAGAI  
PENUMPU PANGAN DAN  
INDUSTRI NASIONAL 2045**



### Tahap 1

**Tahun 2025-2029**

**Penguatan  
Landasan  
Transformasi**



### Tahap 2

**Tahun 2030-2034**

**Akselerasi  
Transformasi**



### Tahap 3

**Tahun 2035-2039**

**Pemantapan  
Transformasi**



### Tahap 4

**Tahun 2040-2045**

**Perwujudan Jawa  
Tengah Maju, Sejahtera,  
Berbudaya dan  
Berkelanjutan sebagai  
Penumpu Pangan dan  
Industri Nasional**



## 6 Sasaran Pokok

<b>01</b>	Terwujudnya SDM unggul dan berdaya saing yang inklusif
<b>02</b>	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkelanjutan
<b>03</b>	Terwujudnya Tata Kelola yang berintegritas dan dinamis
<b>04</b>	Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah
<b>05</b>	Terwujudnya Masyarakat yang Berkarakter dan Berketahanan Sosial
<b>06</b>	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana

## 17 Arah Pembangunan

1. Kesehatan untuk Semua; 2. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif; 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; 5. Penerapan Ekonomi Hijau; 6. Transformasi Digital; 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global; 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertmbhn Ekonomi

9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif

10. Ketenteraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial; 11. Stabilitas ekonomi makro daerah; 12. Daya saing daerah dan ketahanan wilayah

13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter; 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

15. Lingkungan Hidup Berkualitas; 16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan; 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



# PENYELARASAN RPJPD PROVINSI DAN KAB/KOTA

RPJPD Kabupaten/Kota merupakan penerjemahan dari RPJPD Provinsi dan Perencanaan Pembangunan yang sesuai kewenangan dan karakteristik Kabupaten/Kota, yang memuat :

- a. **Visi** Kabupaten/Kota Selaras dengan Visi Provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota
- b. **Sasaran Visi** Kabupaten/Kota selaras dengan Sasaran Visi Provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota
- c. **Misi (Agenda Pembangunan)** Kabupaten/Kota selaras dengan Misi Provinsi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota
- d. **Arah Kebijakan** Kabupaten/Kota selaras dengan Arah Kebijakan Provinsi memuat tahapan dan upaya transformatif yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota serta Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- e. **Sasaran Pokok** Kabupaten/Kota selaras dengan Sasaran Pokok Provinsi yang disesuaikan dengan kewenangan dan karakteristik masing-masing Kabupaten/Kota serta Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

**Total Indikator Utama  
Pembangunan  
Provinsi :**

**45**



**Indikator Utama  
Pembangunan  
yang diturunkan  
kepada Kab/Kota:**

**60**



# **60** Target IUP RPJPD Kabupaten/Kota

- 01** Tingkat Kemiskinan
- 02** Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)
- 03** Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
- 04** Usia Harapan Hidup (UHH)
- 05** Angka Kematian Ibu
- 06** Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
- 07** Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)
- 08** Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)
- 09** Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
- 10** Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):
- 11** Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
- 12** Harapan Lama Sekolah
- 13** Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi
- 14** Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun
- 15** Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan
- 16** Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan
- 17** Jumlah pengunjung tempat bersejarah
- 18** Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir
- 19** Tingkat pemanfaatan perpustakaan
- 20** Jumlah Kejadian Konflik SARA
- 21** Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
- 22** Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- 23** Rasio PDRB Industri Pengolahan
- 24** Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
- 25** Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
- 26** Rasio Kewirausahaan Daerah
- 27** Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
- 28** Return on Aset (ROA) BUMD
- 29** Disparitas Harga
- 30** Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
- 31** Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
- 32** Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi
- 33** Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
- 34** Indek Harga Konsumen (IHK)
- 35** Total Dana Pihak Ketiga/PDRB
- 36** Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan
- 37** Total Kredit/PDRB
- 38** Kapabilitas Inovasi
- 39** Persentase Desa Mandiri
- 40** Tingkat Pengangguran Terbuka
- 41** Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
- 42** Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 43** Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet
- 44** Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
- 45** Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota
- 46** Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota
- 47** Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
- 48** Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan
- 49** Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- 50** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
- 41** Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
- 42** Indeks Risiko Bencana (IRB)
- 43** Kontribusi Penurunan Emisi GRK
- 44** Indeks Reformasi Birokrasi
- 45** Indeks Reformasi Hukum
- 46** Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 47** Indeks Pelayanan Publik
- 48** Indeks Integritas Nasional
- 49** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota
- 50** Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia



# KONSEP ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

# ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan Wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi

## 10 Wilayah Pengembangan (WP)

### PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

merupakan upaya penerapan konsep pembangunan ekonomi pada dimensi keruangan, dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Saling - Ketergantungan (*interdependency*) antar daerah;
2. Perekonomian;
3. Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan serta Lingkungan;
4. Kesamaan karakteristik antar kab/kota dalam satu WP dan ketergantungan pada WP-nya.



# KONSEP ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH (1)

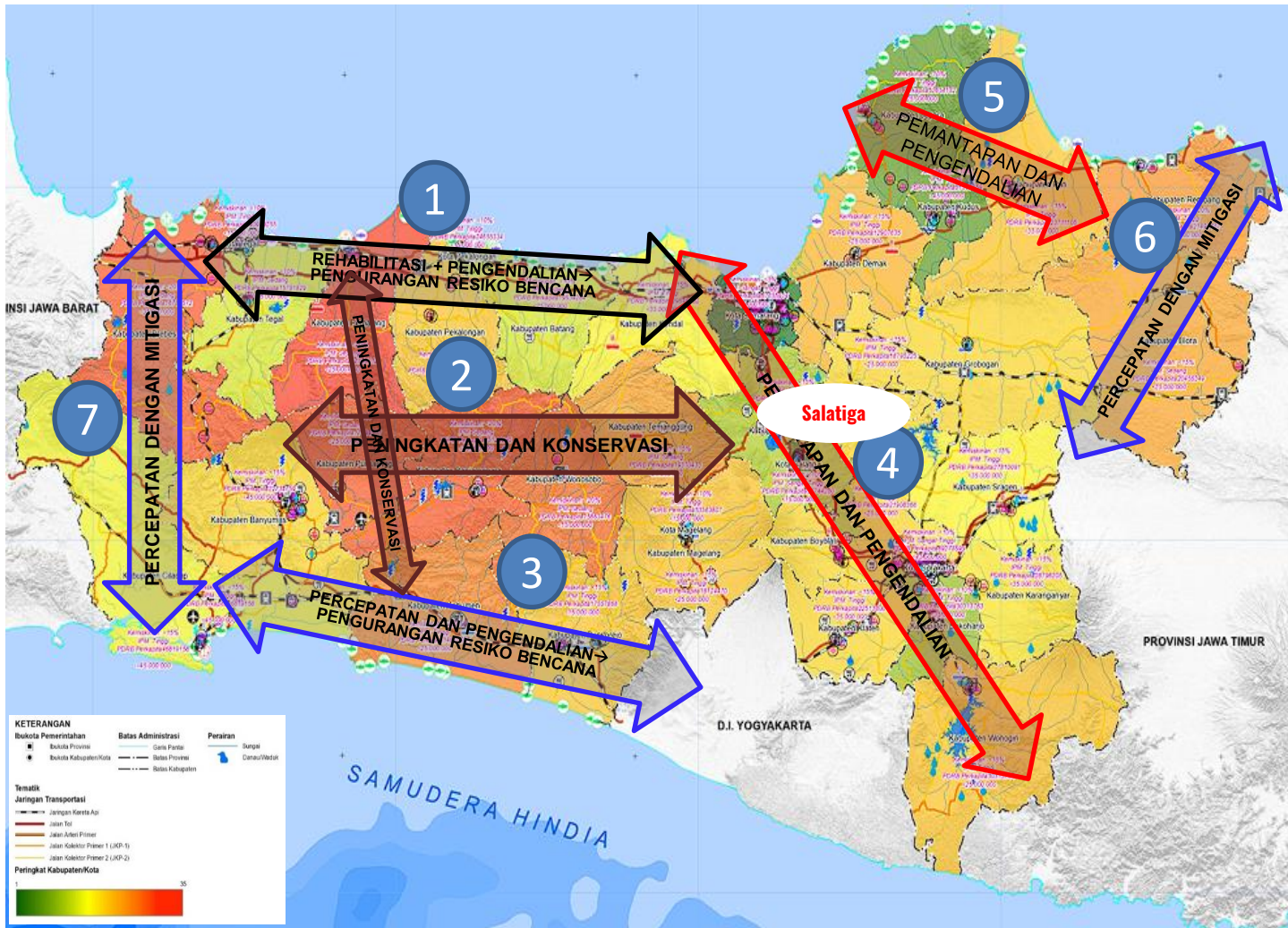


1. WP Cibalingmas meliputi: Kab. Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas
2. WP Keburejo meliputi: Kab. Kebumen dan Purworejo
3. WP Wonobanjar meliputi Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara
4. WP Gelangmanggung meliputi Kab. Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang
5. WP Subosukawonosraten meliputi: Kab. Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Kota Surakarta
6. WP Banglor meliputi: Kab. Rembang dan Kab. Blora
7. WP Jekuti meliputi: Kab. Kudus, Pati, dan Jepara
8. **WP Kedungsepur** meliputi Kab. Kendal, Demak, Grobogan, Kota Semarang, dan **Kota Salatiga**
9. WP Petanglong meliputi: Kab. Batang, Pekalongan, dan Kota Pekalongan
10. WP Bregasmalang meliputi: Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kab. Pemalang, Kota Tegal

Sumber: Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah 2023-2043

- Dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat 8 WP
- Dalam RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 terdapat 7 WP (Jekuti dan Banglor digabung)
- Dalam **Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah 2023-2043 terdapat 10 WP**, dan ini yang akan dimasukkan ke dalam RPJPD 2025-2045

# KONSEP ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH (2)



## 1. Kebutuhan Penanganan 1

Rehabilitasi dan Pengendalian → Pengurangan Resiko Bencana

## 2. Kebutuhan Penanganan 2

Peningkatan Pembangunan dan Konservasi → Pemanfaatan Jasa Lingkungan

## 3. Kebutuhan Penanganan 3

Percepatan dan Pengendalian → Pengurangan Resiko Bencana dan Pengendalian Ruang Pertahanan Negara

## 4. Kebutuhan Penanganan 4 dan 5

Pemantapan dan Pengendalian Koridor Semarang-Solo-Jogja dan Jepara-Kudus-Pati

**(Salatiga masuk dalam koridor 4)**

## 5. Kebutuhan Penanganan 6 dan 7

Percepatan dan Mitigasi Bencana

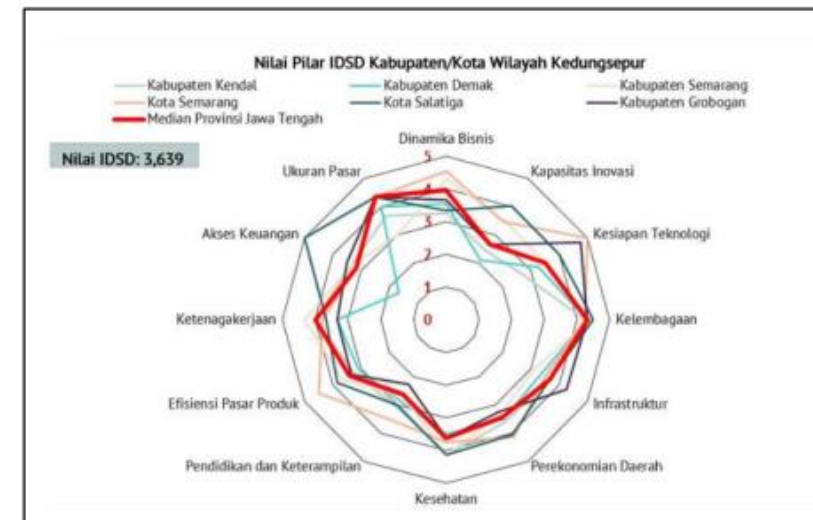
# ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEDUNGSEPUR

1. Mendorong peningkatan pengembangan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
2. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor
3. Mendorong kerjasama antar daerah dalam hal:
  - a. Pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan
  - b. Koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan Kabupaten/ Kota
  - c. Penyediaan prasarana dan sarana di bidang; transportasi, air minum, persampahan, drainase, pengelolaan limbah
  - d. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata; dan
  - e. Penanganan bencana dan kawasan terdampak rob
4. Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan rob

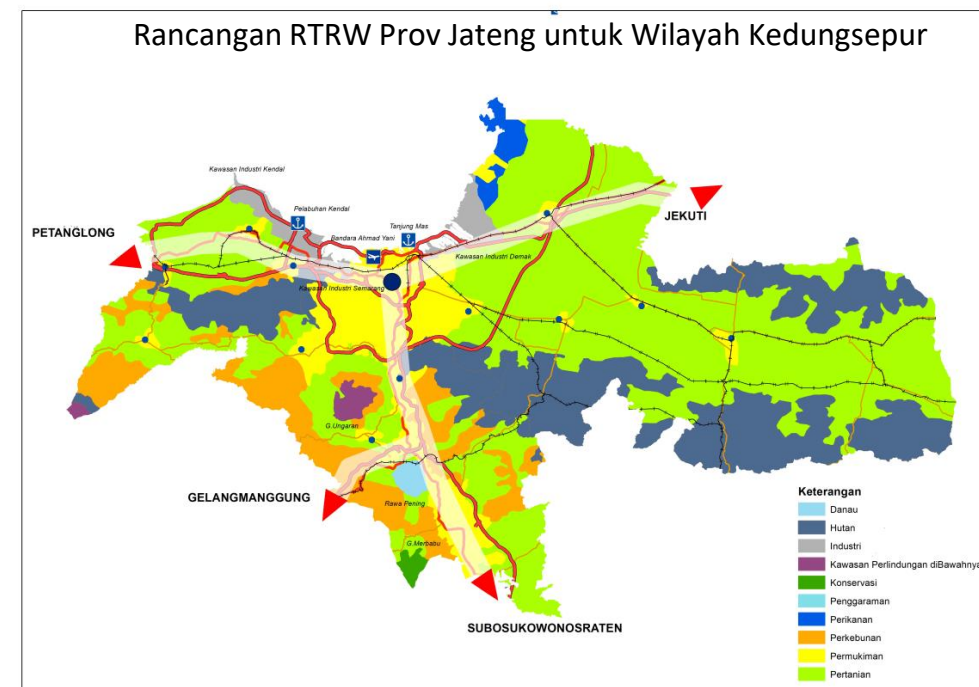
## Dalam Draft RPJPN 2025-2045:

Arah kebijakan untuk mendukung ketahanan sumber daya air terpadu: (iv) Perlindungan pesisir Jabodetabek, **Kedungsepur**, Gerbangkertosusila dari banjir kala ulang 100 tahun

## IDSD Kedungsepur, 2023



## Rancangan RTRW Prov Jateng untuk Wilayah Kedungsepur



# ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA SALATIGA

## 1. Kawasan Pertanian (Pasal 43 Ayat 2 dan 3)

Kota Salatiga diarahkan untuk menjadi **Kawasan Pertanian**. Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan provinsi

## 2. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) (Pasal 56 Ayat 2)

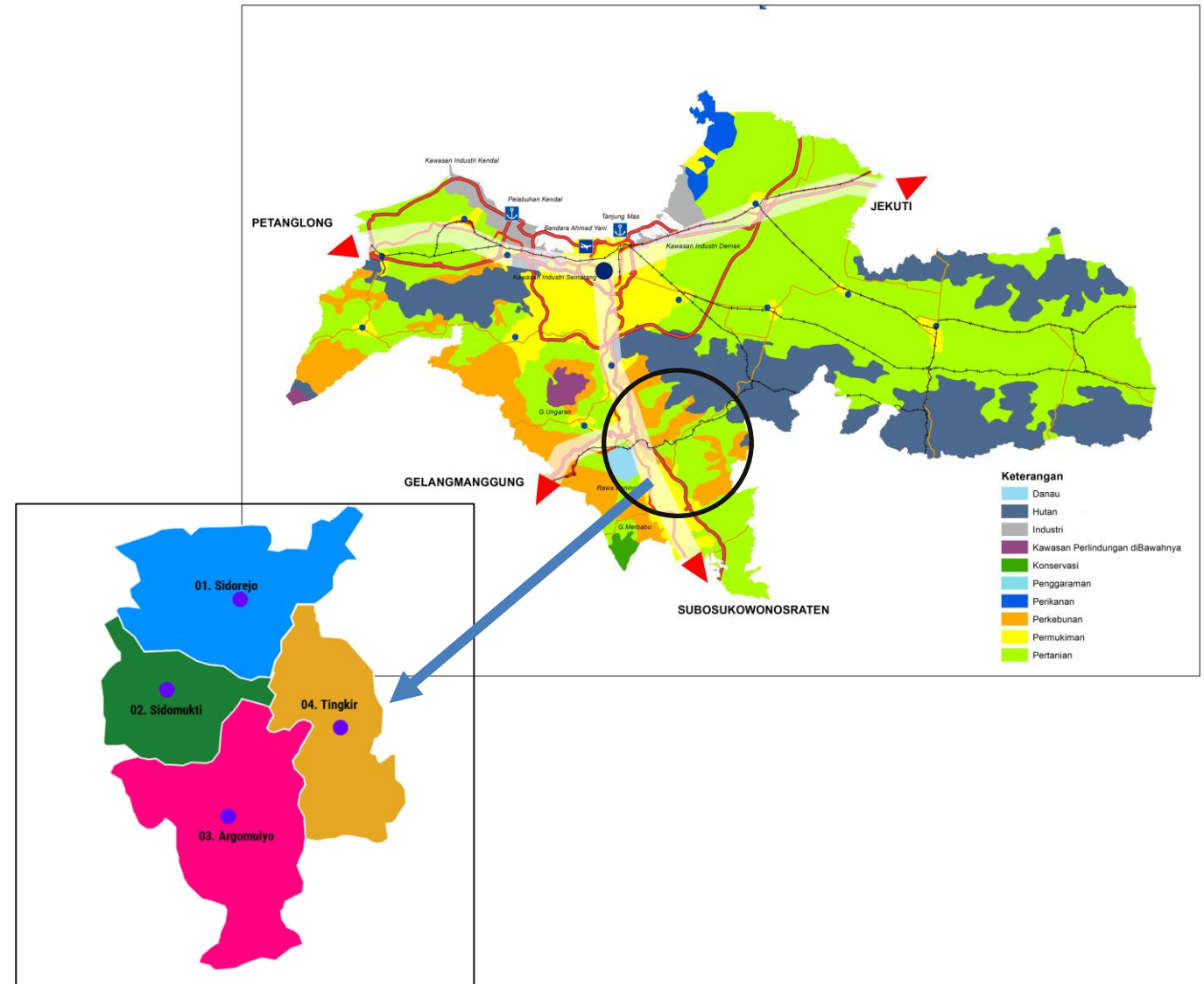
Kota Salatiga masuk ke dalam wilayah pengelolaan **pertambangan** Ungaran-Telomoyo

## 3. Kawasan Pertambangan dan Energi (TE) (Pasal 56 Ayat 3)

Kota Salatiga masuk dalam Wilayah Kerja **Panas Bumi** di daerah Candi Umbul Telomoyo di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung dan **Kota Salatiga**

## 4. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) (Pasal 58)

Kota Salatiga masuk ke dalam KSP dari sudut **kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup** (KSP Rawa Pening yang berada di Kabupaten Semarang dan **Kota Salatiga**)





# TERIMA KASIH

---

## Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pemuda 127-133 Semarang

Tlp. (024) 3515591, 3515592, 3515594

Faks. (024) 3546802

[bappeda.jatengprov.go.id](http://bappeda.jatengprov.go.id)

[bappeda@jatengprov.go.id](mailto:bappeda@jatengprov.go.id)